

POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA DALAM PANDANGAN SYARIAH

Akbar; Muthoifin
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Agama Islam,
Universityas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Politik melibatkan proses pengambilan keputusan tentang isu-isu penting, seperti kebijakan publik, hukum, dan regulasi yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia ditandai dengan gelombang politik identitas yang begitu besar. Identitas menjadi fokus utama dalam kancah politik di Indonesia. Identitas yang banyak digunakan dalam pertarungan politik adalah identitas Islam. Politik identitas juga mewarnai dinamika demokrasi di Indonesia. Hal itu sudah beberapa kali ditunjukkan dalam perpolitikan Indonesia saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Namun, pengaruhnya terhadap demokrasi, terhadap monopoli politik identitas akan memecah belah bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas menjadi isu penting dan kontroversial di Indonesia. Politik identitas di Indonesia merujuk pada fenomena politik yang didasarkan pada identitas kelompok seperti agama, etnis, suku bangsa, dan budaya. Dalam Syariah tidak ada kata larangan untuk beridentitas, jadi disilahkan untuk beridentitas, asalkan sesuai norma-norma yang di jelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, lebih menekankan pada kualitas dari segi hakikatnya dalam kaitannya dengan konsep, nilai dan karakteristik yang terkait dengan objek penelitian.

Kata Kunci: Politik, Identitas, Indonesia, Syariah.

Abstract

Politics involves the process of making decisions about important issues, such as public policy, laws, and regulations that will affect people's lives. In recent years, Indonesia has been marked by a huge wave of identity politics. Identity is a big highlight in the political scene in Indonesia. The identity that is widely used in political battles is Islamic identity. Identity politics also colors the dynamics of democracy in Indonesia. It has been displayed several times on the Indonesian political stage during local elections and elections. However, its influence on democracy, on the exclusivism of identity politics will create a division of the nation. In recent years, identity politics has become a significant and controversial issue in Indonesia. Identity politics in Indonesia refers to political phenomena based on group identity such as religion, ethnicity, ethnicity, and culture. Although identity politics has been practically recorded in its history, Islam itself has never approved and allowed identity politics because this approach violates one rule of the Islamic creed of indirect takfir between two parties who are both Muslims and damages human honor and dignity. This research uses a qualitative approach. Qualitative research emphasizes more on the aspect of natural quality related to concepts, values and characteristics inherent in the object of research.

Keywords: Politics, Identity, Indonesia, Sharia.

1. PENDAHULUAN

Politik adalah suatu bidang atau aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan, pengambilan

keputusan, dan pengaturan masyarakat. Secara umum, politik meliputi proses pembentukan kebijakan, pengaturan dan pembagian kekuasaan, serta pengarahan sumber daya dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Tujuan utama dari politik adalah mencapai kesejahteraan masyarakat dan menjaga rasa aman dalam sistem pemerintahan. Aspek-aspek utama dalam politik meliputi Pengambilan Keputusan. Politik melibatkan proses pengambilan keputusan tentang isu-isu penting, seperti kebijakan publik, hukum, dan regulasi yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, budaya dan bahasa lokal. Misalnya, Papua sendiri memiliki 252 suku dengan bahasanya masing-masing. Hanya dari segi keragaman budaya (pluralisme) hal ini dapat dikatakan sebagai prestasi sejarah yang sangat berharga jika Indonesia dapat bertahan lama. Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai politik identitas yang sering muncul dalam sejarah modern Indonesia harus dikelola dan dikawal dengan bijak oleh penalaran sejarah yang tepat dan cerdas. Saat awal proklamasi, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 70 juta; sekarang, pada awal abad ke-21, jumlahnya sekitar 250 juta, lebih dari tiga kali lipat sejak 1945, dan merupakan negara terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Agama dan budaya yang berbeda, masyarakat Indonesia dapat saling menghormati dan mentolerir perbedaan yang ada.

Politik identitas di Indonesia banyak menuai pro dan kontra baik itu dari kelompok agama, suku, ras, partai politik dan lain sebagainya. Contohnya peristiwa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 telah menjadi fenomena dan menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat DKI Jakarta tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Kasus penistaan Alquran Q.S. Al-Maida [5]: 51 salah satu pasangan calon (Paslon) membangkitkan semangat keberagaman umat Islam sehingga aksi damai 212 berubah menjadi aksi protes di Jakarta, partai yang sangat luar biasa. Aksi damai 212 di Jakarta mencontohkan eratnya hubungan antara agama (Islam) dan politik (negara) sebagai bentuk politik identitas yang begitu kuat sehingga DKI Jakarta terbentuk Pilkada 2017.

2. METODE

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan karena data yang diteliti berasal dari kitab-kitab hadits, kitab-kitab, jurnal dan hasil-hasil penelitian ulama dan cendekiawan Islam. Data yang digunakan terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data utama meliputi hadithshadits para Rasul yang berbicara tentang akidah. Data sekunder sebagai dasar data primer, diambil dari buku-buku dan hasil penelitian yang relevan terkait dengan objek penelitian. Analisis data menggunakan metode analisis teks. Kisah-kisah Alquran dan politik identitas dikumpulkan kemudian dianalisis satu per satu isi, maksud dan tujuannya sehingga ajaran akidah terekspresikan dengan jelas dan akhirnya dihayati suatu topik sesuai dengan isi Al-Quran dan hadits.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik identitas di Indonesia merujuk pada fenomena politik yang didasarkan pada identitas kelompok seperti agama, etnis, suku bangsa, dan budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas telah menjadi isu yang signifikan dan kontroversial di Indonesia. Berikut beberapa contoh politik identitas di Indonesia.

a. Agama

Agama adalah aspek identitas yang kuat di Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Isu-isu agama seringkali digunakan sebagai alat politik untuk mempengaruhi pemilih dan mendapatkan dukungan. Agama memainkan peran penting dalam politik identitas di Indonesia, terutama karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Beberapa isu agama sering menjadi perdebatan politik, seperti isu kebebasan beragama, hukum Islam, dan hak-hak minoritas agama. Beberapa kelompok politik mencoba memperkuat basis mereka dengan menekankan isu-isu keagamaan atau mengaitkan diri mereka dengan kelompok agama tertentu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang sangat beragam dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan beragam agama. Keanekaragaman ini menciptakan tantangan dan peluang dalam mengelola politik identitas.

b. Etnis dan Suku Bangsa

Indonesia memiliki keberagaman etnis dan suku bangsa yang kaya. Beberapa politisi telah mencoba memanfaatkan perbedaan ini untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok etnis tertentu. Meskipun demikian, hal ini juga dapat menyebabkan konflik dan ketegangan antar etnis jika tidak ditangani dengan bijaksana. Politik identitas sering kali menjadi elemen kunci dalam pemilihan umum di Indonesia (Majesty & Prayoga, 2022). Partai politik dan kandidat sering menggunakan isu-isu identitas untuk menarik dukungan pemilih dari kelompok etnis atau agama tertentu. Pendekatan ini dapat menyebabkan polarisasi dan mengurangi fokus pada isu-isu kebijakan yang lebih substansial. Sejarah Indonesia mencatat beberapa konflik yang dipicu oleh politik identitas, seperti konflik etnis dan agama (Stasevich, 2022). Pengelolaan politik identitas yang tidak tepat dapat menyebabkan ketegangan dan konflik sosial di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

c. Daerah

Politik identitas juga sering berkaitan dengan identitas regional atau daerah. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki ciri khas budaya dan politik sendiri, dan isu-isu daerah sering kali menjadi perdebatan dalam politik nasional. Politik identitas juga memainkan peran penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa wilayah mungkin

merasa bahwa identitas dan budaya mereka tidak cukup diakui atau dihormati oleh pemerintah pusat, yang dapat menyebabkan perasaan ketidakpuasan dan aspirasi otonomi.

d. Gender dan Orientasi Seksual

Isu-isu seputar gender dan orientasi seksual juga menjadi bagian dari politik identitas di Indonesia. Beberapa organisasi dan gerakan berjuang untuk hak-hak LGBT dan kesetaraan gender, sementara yang lain mungkin menentangnya karena alasan agama atau budaya.

Politik Identitas dalam Pandangan Syariah

Di Indonesia, identitas Muslim adalah inti dari politik identitas, jadi apakah Islamofobia mengizinkan politik identitas? Menanggapi hal tersebut, banyak pandangan yang sifatnya pro dan kontra (Hamdi et al., 2018). Pemerintah misalnya, belum lama ini mendeklarasikan sikap menolak politik identitas karena dianggap sangat berpeluang besar untuk memecah belah masyarakat. Begitu juga dengan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) sama-sama sepakat menolak politik identitas. Berbeda pandangan dari salah satu partai muslim yaitu Partai Ummat, yang justru menyatakan secara gamblang bahwa partainya akan terang-terangan menerapkan politik identitas sebab bagi partai ummat, Melawan politik identitas adalah menghilangkan moralitas agama dalam dunia politik. Akibatnya, politik kehilangan makna dan terjebak dalam etika relatif dan situasional.

Beberapa Prinsip Al-Qur'an yang Dapat Dihubungkan Dengan Konsep Politik Identitas dan Toleransi di Indonesia:

Tafsir dan pandangan Alquran terkait politik identitas tidaklah tegas, karena Alquran lebih menekankan pada aspek moral, etika, dan prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi individu dan masyarakat. Berikut beberapa prinsip dalam Alquran yang dapat dihubungkan dengan konsep politik identitas dan toleransi di Indonesia:

a. Keragaman dalam Ciptaan Allah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Alquran menekankan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku (Quran, 49:13). Ini menunjukkan penghargaan atas keragaman manusia dan mengingatkan bahwa perbedaan-perbedaan ini adalah bagian dari rancangan Allah.

b. Persatuan dalam Beragama

QS. Ali 'Imran Ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”

Alquran juga menekankan persatuan dalam keyakinan agama sebagai fondasi utama persaudaraan manusia (Quran, 3:103). Ini menunjukkan pentingnya mengutamakan persamaan dalam iman daripada perbedaan etnis atau budaya.

c. Keadilan dan Kesetaraan

QS. An-Nisa' Ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Alquran menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan (Quran, 4:135). Ini dapat diterjemahkan sebagai prinsip politik yang mendukung perlakuan yang adil terhadap semua anggota masyarakat tanpa memandang identitas etnis atau budaya mereka.

d. Toleransi dan Dialog

QS. An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Alquran mendorong untuk berinteraksi dengan orang-orang dari kelompok berbeda dengan cara yang baik dan penuh kesabaran (Quran, 16:90). Ini mencerminkan nilai-nilai toleransi, dialog, dan respek terhadap perbedaan dalam konteks politik dan social.

e. Kerjasama dan Kebaikan

QS. Al-Ma'idah Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya*

Alquran mengajarkan pentingnya bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (Quran, 5:2). Ini dapat diterapkan dalam konteks politik identitas dengan mempromosikan kerjasama lintas kelompok untuk tujuan yang bermanfaat bagi semua.

Politik Identitas di Indonesia dalam Pandangan Syariah

Pandangan politik identitas di Indonesia dari perspektif syariah, atau hukum Islam di Indonesia:

a. Agama sebagai Pusat Identitas

Dalam pandangan syariah, Islam dianggap sebagai agama utama dan harus menjadi bagian sentral dari identitas individu dan masyarakat. Oleh karena itu, ada dorongan untuk mempertahankan dan memperkuat identitas Muslim di Indonesia dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari serta sistem politik negara.

b. Pengaruh Islam dalam Kebijakan Publik

Pandangan syariah dapat mendorong pengaruh Islam dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Ini mencakup implementasi hukum-hukum Islam atau

- nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang, termasuk hukum, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Penganut pandangan ini mungkin mendukung undang-undang dan regulasi yang mencerminkan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip Islam.
- c. Perlindungan Identitas Muslim
- Pandangan syariah juga cenderung memperjuangkan perlindungan identitas Muslim dari pengaruh dan tekanan budaya asing yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat menyebabkan perlawanan terhadap globalisasi budaya atau praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan Islam.
- d. Perlindungan Minoritas Muslim
- Meskipun Islam mayoritas di Indonesia, terdapat pula minoritas Muslim yang berbeda dalam kelompok etnis dan suku bangsa tertentu. Pandangan syariah menekankan perlindungan hak-hak dan identitas minoritas Muslim ini, termasuk hak mereka untuk beribadah dan menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam mereka sendiri.
- e. Penentangan Terhadap Identitas yang Bertentangan dengan Islam
- Dalam pandangan syariah, ada penentangan terhadap identitas atau praktik yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, ada kelompok yang menentang pernikahan sejenis atau gerakan feminisme yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.
- f. Kesatuan Ummat (Persatuan Muslim)
- Islam mendorong persatuan dan kesatuan ummat, yang berarti mengutamakan identitas Muslim sebagai satu kesatuan dalam memahami keyakinan, nilai-nilai, dan tujuan hidup berdasarkan ajaran agama. Pandangan ini menekankan pentingnya menghindari perpecahan dan perbedaan yang dapat melemahkan persatuan umat Muslim.
- g. Keadilan dan Kesetaraan
- Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di antara umat manusia, termasuk dalam konteks politik. Ini berarti tidak ada perbedaan diskriminatif berdasarkan suku bangsa, etnis, atau ras dalam memperlakukan individu dan kelompok di dalam masyarakat.
- h. Identitas Islam sebagai Prioritas Utama
- Dalam pandangan Islam, identitas Muslim harus menjadi prioritas utama dalam membentuk pandangan politik dan mengambil keputusan politik. Hal ini dapat mencakup mengutamakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam kebijakan

publik dan politik negara.

i. Inklusivitas dan Keterbukaan

Pandangan Islam mendorong inklusivitas dan keterbukaan terhadap perbedaan dalam masyarakat. Dalam konteks politik, ini berarti mengakomodasi berbagai identitas dan pandangan di dalam masyarakat, termasuk non-Muslim, dengan cara yang adil dan menghormati hak-hak semua warga negara

j. Toleransi dan Dialog

Islam menganjurkan toleransi terhadap perbedaan dan upaya untuk mencari pemahaman melalui dialog. Dalam politik identitas, hal ini mencakup berusaha memahami kepentingan dan aspirasi berbagai kelompok, serta mencari solusi yang inklusif dan damai bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam pandangan syariah tidak menyebutkan langsung istilah identitas, namun dalam pandangan syariah banyak mengisyaratkan tentang identitas, bahkan dalam isyarat-isyarat Al-Qur'an tersebut mengatur bagaimana beridentitas dengan baik, menggunakan identitas dengan baik, sehingga tidak menyalahi aturan dalam menggunakannya. Sebagaimana di jelaskan dalam ayat-ayat yang terpapar di atas. Al-Qur'an tidak melarang seseorang beridentitas dalam mencapai tujuan (dalam berpolitik), bahkan Al-Qur'an membahas langsung mengenai pemimpin. Apakah pemimpin harus laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim, dan dari ras atau adatnya.

4. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang telah terpapar di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Politik identitas di Indonesia adalah sebuah konsep yang merujuk pada identitas tersebut dan mempengaruhi pikiran dan pilihan politik, tujuan, dan interaksi mereka dalam kontestasi politik. Di Indonesia, politik identitas sangat dipengaruhi oleh etnisitas, corak keagamaan, multikulturalitas, letak geografis dan lain sebagainya.

Pandangan Syariah terhadap politik identitas di Indonesia melibatkan sejumlah konsep dasar yang memengaruhi munculnya politik identitas yakni konsep tauhid, konsep Ummah, Konsep adil, konsep Amr Bil Ma'ruf wa Nahi 'Anil Munkar, dan atau bisa saja karena adanya Konsep Islam Nusantara atau Islam modernis. Dalam Syariah tidak ada kata larangan untuk beridentitas, jadi disilahkan untuk beridentitas, asalkan sesuai norma-norma yang di jelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah terpapar di atas.

Terdapat beberapa saran dari peneliti, menanggapi persoalan politik identitas yang ada di Indonesia agar tidak terjadi polarisasi yang ada dalam kelompok masyarakat. Berikut adalah beberapa saran

untuk mengelola politik identitas di Indonesia:

1. Mendorong dialog dan dialog yang konstruktif
2. Membangun kesadaran akan pluralism
3. Prioritaskan inklusi sosial dan ekonomi
4. Pertahankan kebebasan berbicara dan beragama
5. Kurangi politisasi suku, agama, dan ras
6. Dorong partisipasi politik yang inklusif
7. Tanggapi secara tegas isu-isu kekerasan dan diskriminasi
8. Bangun kesadaran akan persatuan nasional

Penelitian ini tentu jauh dari kesempurnaan. Simpulan yang dihasilkan juga bisa diperdebatkan. Kritik, saran dan masukan akan sangat dibutuhkan untuk perbaikan penelitian ini.

Penulis berharap ada kajian-kajian lanjutan yang mengulas tema ini dengan lebih komprehensif dan menggunakan pisau analisis yang lain, sehingga pertanyaan-pertanyaan seputar politik identitas bisa terjawab dan memuaskan lebih banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A. (2023). Social mobility and politicisation of caste among the Rayeens of Uttar Pradesh. *Contemporary South Asia*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/09584935.2023.2238266>
- Ahmed, Z. S. (2023). Islam and the Politics of Secularism in Pakistan. *Religions*, 14(3), 416. <https://doi.org/10.3390/rel14030416>
- Al-Hamdi, R. (2023a). Political Consciousness of Muhammadiyah: Historical Trajectories and Future. *Studia Islamika*, 29(3). <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.15866>
- Al-Hamdi, R. (2023b). Political Consciousness of Muhammadiyah: Historical Trajectories and Future. *Studia Islamika*, 29(3). <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.15866>
- Anam, H. F. (2019a). Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *POLITEA*, 2(2), 181. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5953>
- Anam, H. F. (2019b). Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *POLITEA*, 2(2), 181. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5953>
- Ansari, K. A., & Suransky, C. (2023). Pluralization Challenges to Religion as a Social Imaginary: Anti-Caste Contestations of the Muslim Quota in India. *Religions*, 14(6), 742. <https://doi.org/10.3390/rel14060742>
- Bima, O., Jurusan, W., Komunikasi Visual, D., Seni, F., Desain, D., Kristen, U., & Surabaya, P. (n.d.). *GRAFFITI DI INDONESIA: SEBUAH POLITIK IDENTITAS ATAUKAH TREN? (Kajian Politik Identitas pada Bomber di Surabaya)*.

<http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=DKV>

- Brown, N. E., & Gershon, S. A. (2023). Distinct Identities II. In *Distinct Identities* (pp. 1–12). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003297031-1>
- Çakır, R. A. (2023). Reclaiming the Umma from the Margins: The Case of Türkiye’s Hüda-Par. *Insight Turkey*, 147–169. <https://doi.org/10.25253/99.2023251.8>
- Carswell, D., & Conway, P. F. (2023). An ethico-political analysis of a national teacher competence framework: Unravelling a ‘preferred’ teacher identity. *British Educational Research Journal*.
<https://doi.org/10.1002/berj.3893>
- Cole, W. M. (2023). Political Ideology and Childhood Vaccination in Cross-National Perspective, 1995 to 2018. *International Journal of Sociology*, 53(4), 283–320.
<https://doi.org/10.1080/00207659.2023.2227458>
- Drexler, E. F. (2022). Impunity and Transitional Justice in Indonesia: Aksi Kamisan’s Circular Time. *International Journal of Transitional Justice*, 16(3), 298–313. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijac010>
- Efendi, I., Charles,), Uin,), Djamil, S. M., & Tinggi, D. B. (n.d.). *POLITIK IDENTITAS DALAM PERSPEKTIF ALQUR’AN DAN HADITS*.
<https://jpion.org/index.php/jpi431>Situswebjurnal:<https://jpion.org/index.php/jpi>
- Fadhlan, A. N., & Azizah, N. (n.d.). *Politik Identitas di Pilkada (Studi Kasus: Hubungan Aksi 212 Dalam Keterpilihannya Anies-Sandi di Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jakarta Periode 2017 Sampai 2022)*. <https://www.researchgate.net/publication/315419117-Rebel-with-a-Cause-Ahok-and->
- Fahmi Adam, Y. (n.d.-a). *Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i1.4395>
- Fahmi Adam, Y. (n.d.-b). *Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Asia Cultural Studies*, 23(3), 384–406. <https://doi.org/10.1080/14649373.2022.2108205>
- Yuristiadhi, G., Makhasi, M., Thohir, M., & Rahimmadhi, Y. (2020). *RAMAI-RAMAI MENOLAK WISATA HALAL: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Halal di Indonesia* (Vol. 14, Issue 2). <https://www.>
- Zhang, C., & Wang, Z. (2023). Despicable ‘other’ and innocent ‘us’: emotion politics in the time of the pandemic. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 418.
<https://doi.org/10.1057/s41599-023-01925-2>
- Zulkarnaini, Z., Ansor, M., & Masyhur, L. S. (2022). Sharia in power: non-Muslims and the performance of Islamic politics in Aceh public Sphere, Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), 257–283. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.257-283>
- ums, h. (2023). *Modul Ujian Komprehensif Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Hes UMS.